

Penataan Wilayah Pesisir Gorontalo

Wakil

Wakil

in Pembangunan (PPP) di mencari calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Gorontalo pada tahun ini. Prof juga sebagai ketua Dewan DPW PPP Gorontalo, ia. Maka, hanya ada 5 Yang tidak report" saat dan wakil bupati untuk sebenarnya, modal kursi Gorontalo sudah cukup tentunya partai Kakbah ini ang koalisi, sebab syarat ang terpenuhi. Namun sang itu. Begitu dibuka di Bupati pendamping langsung ambil formal. Kabupaten Gorontalo adalah itu membudaya dan Basawa. Ada tujuh ikan formulir, nama Menariknya, ada dua fendera Bometo yang Golkar dan Warsito i menjabat anggota Nelson memastikan, mki bupati di luar

ngan calon wakil aya berharap tidak i tetap melakukan ya, dengan partai salah satu syarat elalui survei. Saya edapan para calon osialisasi, karena i" jelas Nelson. gembira, karena ngan dengannya ur beragam latar saba dan Politis. mrihidul ada partai i pada akhirnya e saya apresiasi an saya dan ini kyat Kabupaten banyaknya yang (*)

RU

uang bagi para lom Persepsi. lisan maksimal ew roman dan bukti kwilansi

perulis

RAKTIF

08114333953

DIVISI PRODUKSI
Redaktur Pembantu: Roy Tawon, Hafid Muli, Koordinator Liputan: Hestian Abdulkar, Herdianto, Harwan
Grafis: Staf Redaksi: Irfan Mander, Adnan Muzak, Dany Peradigra, Sutawidhi Nuri, Ruzidwan, Anwaruddin, Cahar Nisma, Zubir Tanjung, Adnan Ak, Ryan Lagi, Redaktur Senior: Jamal Murchi, Sekretaris Redaksi: Agustinus
Staf Redaksi: HDS, Chandra Hestadi, Aris

DIVISI ADVERTISAN DAN PEMERIKSAAN
Rival Turis, Madiana Kurni, Nese Harsono, Yulia Hidayat, Agri Anind

DIVISI USAHA
Konsultan: Evan Andro (Manajer), Achyandri Kadir, Manager: Wani, Harjanto Haruzah, Wakil Manager: Rivald Nur Al, Staf: Nisa, Fadila Lailati (guru), Gufyan Aza (Rivald, Nani Sari), Jean Mawarta, Awan Niamati, Annon Hamani, Zaidi Organizer: Surya Muhammad

Manajer Editorial & Pemasaran: Yusuf Sulih, Pemasaran: Komar, Ropying Tanjung, John Husein, Rivald Widiyanti, Terry Dzik, Mulyadi Murni

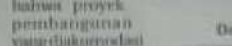
Redaktur: Infomedia, Fandy Bekti

KAWASAN pesisir Gorontalo yang masuk permukiman penduduk patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pasalaya Undang-Undang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (URPWP3K) No 1/2014 yang merupakan revisi UU No 27/2007 telah mengamandatkan Peraturan Daerah (Perda) zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda zonasi ini sejatinya menyiapkan tata ruang lautnya. Apakah Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan Perda ini atau masih dalam tahap pembahasan? Jika, hal itu belandilakukan, maka tata ruang wilayah pesisir Provinsi Gorontalo bakal mengalami ancaman degradasi sumber daya dan ekosistemnya, timbulnya pencemaran lingkungan hingga rentan terhadap bencana alam seperti rob hingga dampak perubahan iklim global. Apalagi di Gorontalo sebagian wilayah pesisirnya termasuk dalam kawasan Teluk Tomini yang memiliki nilai strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Mengapa wilayah pesisir Gorontalo membutuhkan penataan ruang yang terpadu dengan wilayah daratan?

PERAMPASAN

Salah satu masalah terbesar di wilayah pesisir di negeri ini adalah perampasan ruang laut dan sumber dayanya (Ocean grabbing). Masalah ini jarang disinggung oleh para pembuat kebijakan di pusat maupun daerah hingga pelaku usaha. Mengapa? Soalnya masalah ini timbul akibat tata ruang di suatu wilayah belum ada atau amburadul. Patut diketahui bahwa soal penataan ruang di negeri ini masih jadi PR besar. Salah satunya pokok adalah penataan yang belum mengintegrasikan antara wilayah daratan dengan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Masalahnya UU Penataan Ruang No 26/2007 belum menyatakan tegas soal mengintegrasikan antara daratan dengan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Terkesan terlalu berorientasi daratan. Meskipun dalam No 1/2014 telah mengamandatkan setiap provinsi untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) yang merupakan penataan ruang lautnya. Faktanya, hingga pertengahan 2019 baru rampung 21 provinsi di seluruh Indonesia yang memiliki Perda ZWP3K. Sisanya 13 provinsi belum menyelesaikan pembahasan Perda ZWP3K. Apakah termasuk Provinsi Gorontalo? Meskipun demikian, semua

Perda yang sudah dibuat oleh 21 provinsi berdasarkan kebijakannya sangat didominasi proyek infrastruktur dan sebagainya. Faktanya, fakta menunjukkan bahwa proyek pembangunan yang dikeperodasi dalam Perda-Perda tersebut mencakup pembangunan infrastruktur berupa reklamasi, pertambangan, pariwisata bahari, pembangkit listrik tenaga uap, hingga konservasi (KLARA, 2019). Pertanyaannya, "tata ruang laut sesungguhnya buat siapa? Mengapa masyarakat pesisir diabaikan begitu saja? Bukankah penetapan model Perda-Perda semacam ini telah merampas ruang hidup bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan dan penyelamatan ekosistem pesisir? Penulis tak antipati terhadap program pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Perda. Akan tetapi, nasib masyarakatnya mesti diprioritaskan agar tak menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Pasalnya, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil telah memiliki ketentuan "hak dasar" yang dimandatkan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 3/2010 yakni (1) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk melintas dan mengakses laut; (2) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat; (3) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan, dan (4) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk mempraktikkan adat istiadat dalam mengelola laut yang telah dilakukan secara turun-temurun.



Obih David Yusuf

Memang tak bisa dipungkiri infrastruktur jadi domain pemerintah saat ini terutama pemerintah pusat. Mestinya tak hanya infrastruktur fisik saja. Melainkan juga membangun bio-infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membentenginya ancaman bencana alam seperti tsunami, rob dan angin topan. Pembangunan bio-infrastruktur pesisir tersebut diantaranya reboisasi mangrove lewat perhutanan sosial, dan transparansi terumbu karang yang bertujuan untuk memperbaiki

keseluruhannya sehingga stabil dalam alam di wilayah pesisir terjamin dan berkelanjutan. Sekali periode ugakan bahwa masalahnya saat ini, zona tata ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum terpadu dengan ruang daratan. Terbukti, zonasi tata ruang 21 provinsi yang sudah jadi pun lebih berorientasi daratan ketimbang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Bahkan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami perampasan ruang dan sumber dayanya (ocean grabbing) yang ditekankan untuk kepentingan permukiman, pertambangan, komersialisasi lahan, kawasan bisnis hingga aktivitas ekstraksi yang meminggirkan masyarakatnya. Dalam artian mereka tak dilibatkan dalam aktivitas ekonomi yang berkembang hingga tak mengalami akses untuk memanfaatkan sumber dayanya.

dan menyiapkan secara matang. Penanya agar tak menimbun masalah baru di kemudian hari.

BAGAIMANA SEMESTINYA?
Agar pengelolaan dan penataan wilayah pesisir Provinsi Gorontalo dapat berjalan berkelanjutan dan kesejahteraan warganya, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, Pemerintah Provinsi Gorontalo segera menyusun zonasi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang sekaligus diintegrasikan dengan wilayah daratannya. Hal ini penting karena Provinsi Gorontalo memiliki kawasan wisata pulau-pulau kecil, dan Teluk Tomini yang memiliki nilai ekonomi kerumahan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Jika ini terwujud, maka Provinsi Gorontalo yang pernah memiliki zona ruang Provinsi yang mengintegrasikan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan daratan. Proses penyusunannya tak perlu lagi konvensional karena telah tersedia teknologi informasi geografis berbasis satelit maupun drone dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Kedua, dalam dokumen ZWP3K mestinya diberikan prioritas yang sama terhadap pemberdayaan ekonomi nelayan dan pembangunan bio-infrastruktur agar wilayah pesisir Gorontalo memiliki sabuk hijau pesisir (coastal green belt). Sabuk hijau pesisir ini tak hanya memperbaiki fungsi ekologi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun dapat juga mengantisipasi ancaman bencana alam (tsunami, rob dan angin topan) sehingga mengurangi dampaknya bagi manusia.

Ketiga, dalam proses penyusunan dokumen ZWP3K pemerintah Gorontalo sebaik melibatkan semua pemangku kepentingan. Mulai dari masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, gerakan masyarakat sipil dan pemerintah sendiri sehingga proses partisipasi publiknya tak bersifat formalitas semata. Melainkan, amat partisipatif yang sejalan dengan semangat UU PWP3K No 1/2014. Penataan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Gorontalo jadi keniscayaan, supaya pembangunan ekonomi di daerah tersebut tak hanya menciptakan keadilan ekonomi semata. Melainkan, keadilan ekologi lewat keberlanjutan sumber daya dan ekosistemnya serta keadilan dalam pemanfaatan ruang. Semoga!

Penulis adalah Dosen Universitas Negeri Gorontalo

memang tak bisa dipungkiri infrastruktur jadi domain pemerintah saat ini terutama pemerintah pusat. Mestinya tak hanya infrastruktur fisik saja. Melainkan juga membangun bio-infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membentenginya ancaman bencana alam seperti tsunami, rob dan angin topan. Pembangunan bio-infrastruktur pesisir tersebut diantaranya reboisasi mangrove lewat perhutanan sosial, dan transparansi terumbu karang yang bertujuan untuk memperbaiki

keseluruhannya sehingga stabil dalam alam di wilayah pesisir terjamin dan berkelanjutan. Sekali periode ugakan bahwa masalahnya saat ini, zona tata ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum terpadu dengan ruang daratan. Terbukti, zonasi tata ruang 21 provinsi yang sudah jadi pun lebih berorientasi daratan ketimbang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Bahkan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami perampasan ruang dan sumber dayanya (ocean grabbing) yang ditekankan untuk kepentingan permukiman, pertambangan, komersialisasi lahan, kawasan bisnis hingga aktivitas ekstraksi yang meminggirkan masyarakatnya. Dalam artian mereka tak dilibatkan dalam aktivitas ekonomi yang berkembang hingga tak mengalami akses untuk memanfaatkan sumber dayanya.

Memang tak bisa dipungkiri infrastruktur jadi domain pemerintah saat ini terutama pemerintah pusat. Mestinya tak hanya infrastruktur fisik saja. Melainkan juga membangun bio-infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membentenginya ancaman bencana alam seperti tsunami, rob dan angin topan. Pembangunan bio-infrastruktur pesisir tersebut diantaranya reboisasi mangrove lewat perhutanan sosial, dan transparansi terumbu karang yang bertujuan untuk memperbaiki

keseluruhannya sehingga stabil dalam alam di wilayah pesisir terjamin dan berkelanjutan. Sekali periode ugakan bahwa masalahnya saat ini, zona tata ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum terpadu dengan ruang daratan. Terbukti, zonasi tata ruang 21 provinsi yang sudah jadi pun lebih berorientasi daratan ketimbang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Bahkan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami perampasan ruang dan sumber dayanya (ocean grabbing) yang ditekankan untuk kepentingan permukiman, pertambangan, komersialisasi lahan, kawasan bisnis hingga aktivitas ekstraksi yang meminggirkan masyarakatnya. Dalam artian mereka tak dilibatkan dalam aktivitas ekonomi yang berkembang hingga tak mengalami akses untuk memanfaatkan sumber dayanya.

Penulis adalah Dosen Universitas Negeri Gorontalo